

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum terutama pembangunan jalur kereta api, tentunya dibutuhkan tanah yang tidak sedikit guna kepentingan tersebut. Sehingga dengan demikian dibutuhkan kerjasama untuk membebaskan tanah guna pembangunan jalur ganda rel kereta api. Dari tahap pembebasan lahan ini ada dua hal yang harus dilakukan, yakni pembebasan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sendiri dan lahan milik masyarakat (hak milik) yang terkena proyek pembangunan jalur rel kereta api. Proyek yang akan dilaksanakan pastinya berdampak besar bagi perekonomian negara, akan tetapi dalam proses pembangunan ini seringkali ditemui hambatan salah satunya yaitu apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemilik lahan tanah dengan pihak yang membangun. Kesepakatan yang dimaksud tidak lain berkaitan dengan biaya ganti rugi terhadap warga yang terkena pembebasan lahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Krobokan dan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Adapun pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Dari permasalahan diatas dapat dibahas mengenai Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalur rel ganda kereta api lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pengajuan Permohonan dan Penetapan Lokasi, Pembentukan Panitia Pegadan Tanah (P2T), Penyuluhan atau Sosialisasi, Pengukuran dan Penentuan Batas-Batas, Pendataan, Pengumuman Hasil Pendataan, Musyawarah Harga dan Penetapan Bentuk Besarnya Ganti Rugi, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. Berkaitan dalam pembangunan jalur ganda rel kereta api lintas Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yakni tidak adanya kesepakatan Pemberian ganti rugi antara pihak PT KAI dan warga setempat dan dan warga yang menganggap tanahnya dinilai lebih murah di bandingkan pemilik tanah lainnya tanpa memperhatikan luas tanah, bangunan serta tanaman, Adapun penyelesaiannya yaitu diadakan pendekatan secara persuasif oleh panitia pengadaan tanah.

Kata Kunci : Tanah, Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah

ABSTRACT

In the implementation of development of public interests, especially the construction of railroad tracks, of course land is needed that is not small for these interests. Thus, cooperation is needed to free land for the construction of a double track railway. From this stage of land acquisition, there are two things that must be done, namely land acquisition owned by PT. Indonesian Railways itself and community-owned land (ownership rights) affected by the railroad development project. Projects that will be implemented certainly have a big impact on the country's economy, but in the development process often encountered obstacles one of which is that if no agreement is reached between the land owner and the party that built it. The agreement in question is nothing but related to the cost of compensation to the residents affected by the land acquisition.

This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. This research takes the location of the study in the Village of Krobokan and the Semarang City Land Office. As for the data collection using primary data and secondary data.

From the considerations above, it can be discussed about the implementation of land acquisition in the construction of a double track railroad in Pekalongan-Semarang in Krobokan Sub-District, West Semarang District, Semarang City. (P2T), Extension or Outreach, Measurement and Determination of Limits, Data Collection, Announcement of Landing Results, Deliberation on Price and Determination of the Amount of Compensation, Compensation Payment and Releasing Rights. In connection with the construction of the Pekalongan-Semarang double track railroad in Krobokan sub-district, West Semarang sub-district, Semarang City does not include an agreement to provide compensation between PT KAI and citizens and citizens who need land, building with plants, the replacement is made and made persuasive by the land acquisition committee.

Keywords: Land, Public Interests, Land Acquisition